

ORANGE BOOK 3

# GREEN ECONOMY

Menuju Pembangunan Berkelanjutan

*Green economy* adalah salah satu gerakan ke arah perubahan paradigma. *Green economy* mencoba mengubah mentalitas "*growth first clean up later*" menjadi, apa yang disebut oleh Gergescu-Rogen sebagai "*growth and clean up are viewed in an integrated fashion*". Gerakan yang didasari pada semangat Georgescu-Rogen (atau dikenal dengan *G-R rule*) kini telah menjadi gerakan yang sedang dijalankan secara masif di berbagai negara termasuk di Asia yang dipelopori oleh Korea dan China. Meski muncul dengan jargon yang bermacam-macam seperti *green growth (OECD)*, *green jobs (ILO)*, *green industry (UNIDO)*, *green business* serta *green economy (UNEP)* sendiri, esensi dari semuanya yakni mengembalikan peran alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ekonomi.



**PT Penerbit IPB Press**  
Kampus IPB Taman Kencana  
Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16151  
Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: [ipbpress@ipb.ac.id](mailto:ipbpress@ipb.ac.id)

ORANGE BOOK 3  
GREEN ECONOMY

ORANGE BOOK 3

# green ECONOMY

Menuju Pembangunan Berkelanjutan



# MEMAHAMI *GREEN ECONOMY* SECARA KRITIS

Oleh:  
Aceng Hidayat<sup>1</sup>

---

## 1. Pendahuluan

Pada tahun 1989, David Pierce, Anil Markandya, dan Edward D Barbier dari *The London Environmental Economic Center*, bekerjasama dengan *the International Institute for Environment and Development* dan *the Department of Economics of University College, London* menerbitkan *Blueprint for A Green Economy*. Buku yang diterbitkan oleh *Earthscan Publications Ltd London* tersebut dipersembahkan kepada *Department of the Environment*, UK sebagai landasan kebijakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Pierce *et al.*, 1989).

Selang dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1991, David Pierce, *et al.* kembali menerbitkan buku berjudul *Blueprint 2: Greening the World Economy*. Sebagaimana buku pertama, buku kedua pun diterbitkan oleh penerbit yang sama. Jika pada buku pertama *green economy* dimaknai secara mikro melalui pendekatan teori ekonomi lingkungan seperti valuasi lingkungan, neraca sumberdaya, *benefit-cost analysis* dan teori *discounting the future*, maka pada buku kedua David Pierce, *et al.* memaknai *greening the world economy* melalui pendekatan makro. Oleh karena itu, yang dibahas pada buku dua mengenai *global commons*, *global warming*, *carbon trade*, *economics of tradable permit*, *economics of ozon layer* dan lain-lain (Pierce *et al.*, 1991).

Pierce *et al.*, menulis kedua buku tersebut terinspirasi oleh buku "*Our Common Future*" yang diterbitkan oleh *the World Commission on Environment and Development* (WECD), atau dikenal dengan *Brundtland Commission* pada tahun 1987. Amanat penting yang disampaikan oleh buku tersebut adalah konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu, pembangunan

1 Staf Pengajar pada Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat global saat ini tanpa mengurangi kemampuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus dapat mewariskan kesejahteraan pada generasi mendatang berupa aset lingkungan dan sumberdaya alam minimal sama dengan yang kita terima dari generasi sebelumnya, *plus* ilmu pengetahuan, teknologi dan *man-made capital*. Inilah merupakan pengertian pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi *mainstream* ekonomi dan pembangunan (WCED, 1987).

Buku *Blueprint for a Green economy* yang disebutkan di atas merupakan panduan strategis untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan melalui pengintegrasian ekonomi dan lingkungan. Artinya, konsep pembangunan berkelanjutan dibangun di atas kesadaran bahwa sistem ekonomi berdampak pada sistem lingkungan melalui pemanfaatan SDA, pembuangan limbah ke media lingkungan, dan lain-lain. Pun demikian sebaliknya, sistem lingkungan akan mempengaruhi sistem ekonomi melalui berkurangnya daya dukung lingkungan (Pierce *et al.*, 1989). Pada praktiknya, khususnya di negara berkembang, lingkungan selalu mensubsidi pertumbuhan ekonomi dengan cara mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Karena itu, tantangan terberat ke depan bagi negara-negara berkembang adalah bagaimana mengintegrasikan kedua kepentingan tersebut dalam sebuah kebijakan. Dikotomi antara kepentingan lingkungan dan ekonomi harus segera diakhiri.

Sejak buku *Blueprint for Green Economy* dan *Blueprint: Greening the World Economy* diterbitkan, prase *green economy* jarang terdengar. Pun, tidak menyertai prase pembangunan berkelanjutan yang hampir muncul pada setiap pembicaraan masalah ekonomi dan pembangunan. Pertemuan internasional yang membahas masalah lingkungan, pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim dan lain-lain tidak menyertakan prase *green economy*.

Terminologi *green economy* baru terdengar kembali sejak dua tahun terakhir sejalan dengan maraknya pembahasan fenomena perubahan iklim global, dan semakin dekatnya Rio Summit+20 bulan Juni 2012. Perubahan iklim global yang diyakini mempengaruhi iklim mikro (*micro climate*) banyak menyadarkan penduduk bumi bahwa perubahan iklim global itu ada, dan dampaknya dapat dirasakan. Nelayan dan petani merupakan kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak perubahan iklim. Karena itu munculah berbagai usulan strategi mitigasi untuk jangka

panjang dan adaptasi untuk jangka pendek, dengan tujuan mereduksi dampak tersebut agar tidak terlalu merugikan. *Green economy* mengemuka sebagai respon atas fenomena perubahan iklim global dan permasalahan lingkungan lainnya yang dianggap mengancam keberlanjutan kehidupan, termasuk keberadaan bumi di mana kita berada ini.

Lalu, apa itu *green economy*? Adakah kesamaan dengan "*green economy*" yang disampaikan Pierce *et al.* 20 tahun lalu? Dalam tulisan ini penulis mencoba memahami *green economy* sebagaimana disampaikan oleh *United Nations Environmental Program* (UNEP) secara kritis, yang melihat relevansinya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan, perubahan iklim, sekaligus mengatasi kemiskinan. Hal ini penting agar *green economy* tidak di"main"kan oleh kepentingan sekelompok negara maju.

## 2. Mengapa Harus *Green Economy*?

*United Nations Environmental Program* (UNEP) dalam dokumen berjudul "*Towards A Green Economy*" mendefinisikan *green economy* sebagai suatu sistem ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas manusia dan keadilan sosial sekaligus juga dapat mereduksi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNEP, 2011). Dengan kata lain, *green economy* mendorong investasi publik dan swasta yang dapat memicu pertumbuhan pendapatan dan kesempatan kerja namun pada saat yang sama juga dapat mengurangi emisi karbon dan polusi; meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan energi dan sumberdaya; serta mencegah kehilangan *biodiversity* dan jasa ekosistem alam. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan reformasi regulasi dan kebijakan investasi.

UNEP (2011) menegaskan, lahirnya *green economy* merupakan respon atas hasil evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sejak konsep pembangunan berkelanjutan diperkenalkan pada tahun 1980-an, di satu sisi telah berhasil memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, namun di sisi lain meninggalkan persoalan lingkungan dan kemiskinan yang parah. Industrialisasi di negara-negara maju seperti di USA, Canada, Jepang, Australia, Eropa Barat, dan *new emerging industrial countries* seperti Korea Selatan dan China, telah menghasilkan emisi karbon dan bahan pencemar lainnya. Emisi karbon yang tinggi dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil untuk menggerakkan sistem transportasi dan industri.

Di sejumlah negara berkembang, seperti Indonesia, China dan Vietnam, pertumbuhan ekonomi mencapai angka tinggi, bahkan China hampir mencapai angka dua digit. Suatu prestasi yang luar biasa. Namun, pada saat yang sama terjadi deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan. Dengan cara lain, capaian ekonomi yang tinggi diraih melalui praktik *brown economy*. Karena itu, upaya pengarus-utamaan (*mainstreaming*) *green economy* oleh UNEP tidak dimaksudkan untuk menggantikan konsep “pembangunan berkelanjutan”, melainkan sebagai upaya memperkuat strategi dalam merealisasikan konsep tersebut.

Dalam buku “*Towards green economy*”, UNEP mencoba memaparkan langkah-langkah bagaimana menghijaukan ekonomi (*how to green economy*). Hasil yang diharapkan, *green economy* dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi namun pada saat yang sama mampu mereduksi emisi karbon dan polusi; meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan sumberdaya; dan mereduksi kemiskinan (*poverty eradication*) di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, kehutanan, air bersih, dan energi. Sebagai contoh, pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan pertanian yang ramah lingkungan dapat memperbaiki kesuburan tanah dan ketersediaan air, dan hal ini maha penting bagi pertanian subsisten di mana sekitar 1,3 miliar manusia masih menggantungkan kehidupan terhadapnya (UNEP, 2008). Sampai di sini, tidak ada yang salah dengan *green economy* karena secara konseptual relevan dengan kepentingan masyarakat global.

### 3. Urgensi *Green Economy*

*United Nations Environmental Program* (2011) menyampaikan enam agenda penting *green economy* untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, *green economy* mengakui adanya *natural capital*; *kedua*, memainkan peran utama dalam penyelesaian kemiskinan; *ketiga*, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keadilan sosial; *keempat*, menggantikan energi fosil dengan energi terbarukan; *kelima*, mendukung efisiensi energi dan sumberdaya; *keenam*, menciptakan kehidupan kota yang berkelanjutan dan rendah emisi karbon; dan *green economy* dapat memelihara dan merestorasi kekayaan alam.

#### 3.1. *Green Economy* Mengakui Nilai *Biodiversity*

*Biodiversity* seperti sumberdaya genetik, spesies dan ekosistem merupakan kekayaan alam (*natural capital*) yang sangat berharga. *Biodiversity* telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi umat manusia, menyediakan *input* penting bagi pembangunan ekonomi dan meregulasi sistem lingkungan sehingga nyaman dan aman bagi kehidupan. Oleh karena itu, kekayaan alam seperti hutan, danau, laut, pesisir, sungai dan lain-lain merupakan sumber *biodiversity* yang sangat bernilai. Investasi untuk mempertahankan kondisi *natural capital* agar tetap prima atau memperbaikinya bagi yang sudah parah merupakan investasi jangka panjang yang tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, *green economy* menaruh perhatian pada upaya pelestarian dan pemulihan sumberdaya *biodiversity*. Estimasi UNEP (2011), untuk memulai *green economy* diperlukan investasi sebesar 2% dari total GDP global (sekitar US\$ 1300 miliar) di mana 0.5% nya digunakan untuk memulai upaya pelestarian dan pemulihan kondisi *natural capital* seperti hutan, pertanian, *freshwater*, dan perikanan. Adapun program utama investasi dalam bidang *natural capital* meliputi upaya penurunan laju deforestasi, mengembangkan pertanian ramah lingkungan (*greening agriculture*), pemulihan sumberdaya air, dan perikanan.

Hutan merupakan infrastruktur ekologi yang maha penting bagi umat manusia. Komoditi dan jasa lingkungan yang dihasilkan hutan dapat menopang kehidupan lebih dari satu miliar umat manusia (FAO, 2006). Hutan menyediakan jasa lingkungan seperti regulasi sistem hidrologi dan iklim mikro yang nyaris tak tergantikan. Hutan juga merupakan rumah bagi 80% spesies, menopang keberlanjutan sistem pertanian, dan sektor-sektor lain yang *di-driven* oleh sumberdaya alam seperti kesehatan, pariwisata, dan lain-lain.

Laju deforestasi dan degradasi sumberdaya hutan yang belakang ini marak terjadi di berbagai belahan dunia didorong oleh kebutuhan kayu dan keperluan lahan untuk pengembangan pertanian. Hal ini berarti kita telah kehilangan jasa lingkungan dan peluang ekonomi lainnya dari hutan sejalan dengan berkurangnya sumberdaya hutan. Hal ini telah mengakibatkan lahirnya persoalan-persoalan sosial dan ekonomi di masyarakat. Biaya sosial dan ekonomi menjadi lebih mahal yang pada gilirannya menurunkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Itulah yang mendorong *green economy* menaruh perhatian pada pemulihan

sumberdaya hutan. UNEP menegaskan investasi 0,03% dari total GDP per tahun antara 2011-2050 untuk konservasi hutan dan reforestrasi akan meningkatkan nilai hutan sebesar 20% dari pola pengelolaan biasa (*business as a usual*), di luar penyerapan tenaga kerja formal di sektor kehutanan dan jasa penyerapan karbon.

*Green economy* juga bertujuan menghijaukan pertanian (*to green agriculture*). Sektor pertanian sangat penting, karena sektor inilah yang memberi makan populasi dunia yang terus bertambah. Diperkirakan pada tahun 2050 terdapat sembilan miliar penduduk dunia. Memperhatikan kondisi ini pertanian menjadi sangat penting dan strategis. Tidak ada pilihan, pertanian harus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan populasi dunia. Namun dalam pengembangannya, tidak boleh merusak lingkungan dan menggerogoti sumberdaya alam lain. Praktik pertanian yang boros air, pupuk kimia dan pestisida, dan pengolahan lahan secara masif telah berkontribusi pada degradasi lingkungan. IPCC melaporkan saat ini pertanian menggunakan lebih dari 70% air (*freshwater*) global dan menyumbang 13% total emisi karbon global (IPCC, 2007). Selain itu, praktik pertanian saat ini juga menimbulkan gangguan kesehatan akibat penggunaan pestisida yang menyebabkan kematian lebih dari 40.000 orang setiap tahunnya di dunia (UNEP, 2004). Oleh karena itu, praktik pertanian yang tidak ramah ekologi seperti yang saat ini berlangsung harus dihentikan dan digantikan dengan *green agriculture* yang lebih menyejahterakan petani, ramah ekologi (*agroecology*) dan berkelanjutan.

Di beberapa negara Amerika Latin telah dikembangkan *agroecology* yang dianggap lebih ramah ekologi, cocok untuk pertanian subsisten dan mendukung tercapainya kedaulatan pangan. Mulvani (2010) menyatakan bahwa *agroecology* dapat menurunkan emisi karbon, mengkonservasi *biodiversity*, meningkatkan pengetahuan lokal, meningkatkan kesuburan lahan, pengendalian hama terpadu dan meningkatkan produktivitas pertanian. *Agroecology* pun pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pertanian 30-100% dari praktik pertanian biasa, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menciptakan kedaulatan pangan.

### 3.2. Peran Sentral *Green Economy* dalam Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan masih merupakan persoalan utama di kebanyakan negara, dan merupakan cerminan ketidakadilan sosial yang sangat kasat mata. Persoalan kemiskinan terkait dengan ketidakadilan akses terhadap pendidikan, kesehatan, sumber permodalan, kesempatan berusaha, memperoleh pendapatan (*income*), dan kepastian *property* atas sumberdaya alam. Kemiskinan tersebut secara sistematis harus diatasi namun dengan cara yang tidak menguras *natural capital*. Hal ini terutama diarahkan kepada negara dengan penghasilan rendah, di mana mata pencaharian utama penduduknya masih sangat tergantung pada sumberdaya alam dan jasa lingkungan (TEB, 2008).

Untuk mengatasi kemiskinan, UNEP (2011) menawarkan program, di antaranya, *greening agriculture*; investasi di bidang penyediaan air bersih, pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan *ecotourism*. *Greening agriculture* adalah perubahan tata cara bertani konvensional yang *high external input ke low* bahkan *zero external input (agroecology)*, dengan penekanan pada *smallholders/peasants*. Sebagaimana disampaikan oleh Mulvani (2010), *agroecology* dapat meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan kualitas lahan dan mengurangi kemiskinan, sehingga dapat dianggap sebagai investasi dalam *natural capital*. Nagayets (2005) mengatakan bahwa secara global terdapat sekitar 525 juta petani, 404 juta di antaranya mengelola pertanian kecil dengan lahan kurang dari 2 hektar. Oleh karena itu, Nagayets menegaskan jika *green economy* difokuskan pada pertanian skala kecil maka akan mampu mengurangi kemiskinan yang signifikan secara global. Hal ini didukung juga oleh hasil penelitian Irz *et al.*, (2001) di Afrika dan Asia, *best practice* pertanian ekologis, *integrated farming, agroforestry, integrated pest management*, dan *best practice* lainnya yang sejenis telah mampu meningkatkan hasil pertanian sebanyak 79%, mereduksi kemiskinan petani, meningkatkan kualitas lahan sekaligus juga meningkatkan daya serap karbon (*carbon sequestration*). Hasil pemodelan UNEP (2011) menunjukkan bahwa jika pertanian ramah lingkungan diterapkan secara benar maka akan mampu mengubah pertanian sebagai *emiter* gas rumah kaca menjadi penyerap gas rumah kaca.

Kemiskinan dapat pula diatasi melalui investasi dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi keluarga miskin. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang maha penting bagi keberlangsungan kehidupan. Namun sayang, banyak manusia di berbagai belahan dunia tidak mendapatkan air bersih yang cukup. WHO (2010) melaporkan bahwa terdapat 884 juta orang secara global yang tidak memiliki akses terhadap air bersih. Selain air bersih, sanitasi juga masih merupakan persoalan serius. Menurut WHO (2010), ada sekitar 2,6 miliar orang di dunia yang tidak memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang baik. Kekurangan air bersih dan layanan sanitasi yang tidak memadai, secara global telah menyebabkan kematian 1,4 juta anak balita setiap tahun.

Selain menyebabkan penyakit dan kematian, ketiadaan akses terhadap air bersih dan sanitasi juga menambah beban golongan miskin. Ketiadaan akses terhadap air bersih memaksa mereka untuk membelanjakan sebagian pendapatannya untuk membeli air bersih atau memaksa anak-anak dan perempuan mengalokasikan waktu untuk mendapatkan air bersih dari tempat yang terkadang sangat jauh. Fasilitas sanitasi yang tidak memadai juga merupakan penambah beban kehidupan golongan miskin. Sanitasi yang tidak baik merupakan sumber penyakit sehingga mereka terpaksa harus mengalokasikan pendapatannya yang sangat terbatas untuk keperluan pengobatan. Jika tidak ada uang untuk berobat mereka akan hidup dengan penyakit yang sudah pasti akan membuat mereka tidak dapat bekerja dan tidak berpenghasilan. Hasil riset *World Bank* melaporkan bahwa biaya pengobatan penyakit terkait kekuarangan air bersih dan buruknya sanitasi dapat mencapai 2% dari total GDP Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan Filipina (World Bank, 2008)

Skenario *Green economy* untuk *green investment* dalam menyediakan air bersih dan sanitasi membutuhkan dana sekitar 0,16% dari total GDP global per tahun. Dengan investasi sebesar ini, pemanfaatan air secara global dapat dipertahankan pada level berkelanjutan, dan MDG untuk air bersih dapat dicapai pada tahun 2015. Atau paling tidak, investasi tersebut dapat merupakan prekondisi bagi penyiapan akses terhadap air bersih dan sanitasi sebagai tahap awal dalam upaya melaksanakan *green economy* (UNEP, 2011).

Selain keterbatasan terhadap akses air bersih dan sanitasi, golongan miskin juga memiliki akses yang terbatas terhadap energi. Dengan kata lain, golongan miskin juga mengalami miskin energi. *World Development Report* (2010) melaporkan bahwa saat ini ada sekitar 1,6 miliar orang secara global memiliki kekurangan pasokan listrik. Di Afrika, ada sekitar 110 miliar rumah tangga miskin yang secara total mengeluarkan anggaran sekitar US\$4 miliar per tahun untuk membeli minyak tanah untuk penerangan. Penggunaan minyak tanah selain mahal, juga tidak sehat dan tidak aman. Selain itu, sistem pasokan energi saat ini pun mencerminkan ketidakadilan. Di satu sisi terjadi penghamburan energi, di sisi lain masih terdapat 2,7 miliar rumah tangga di dunia yang masih menggunakan energi biomassa tradisional untuk keperluan makan (OECD/IEA, 2010). Padahal, diyakini penggunaan energi biomassa dapat menyumbang emisi gas rumah kaca dan mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, *green economy* menaruh perhatian untuk mengatasi kemiskinan energi melalui investasi *renewable green energy* dan berupaya membuka akses pada energi listrik untuk keluarga miskin. Hal tersebut dapat dicapai jika ada alokasi anggaran sebesar US\$ 36 miliar per tahun antara tahun 2010-2030 (UNEP, 2010).

UNEP juga mengagendakan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan *ecotourism*. Menurutnya, pengembangan *ecotourism* akan mendukung penguatan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan. Namun jika tidak dikelola dengan bijak, *ecotourism* akan berdampak negatif pada lingkungan. Hal ini dikarenakan *ecotourism*, potensial menghasilkan emisi GRK, konsumsi air, pembuangan limbah, merusak *biodiversity* darat dan laut, serta mengancam kelestarian nilai dan budaya lokal. Oleh karena itu, menghidupkan *ecotourism* sangat penting, karena jika tidak akan mengancam keberlanjutan *ecotourism* itu sendiri. Padahal, *ecotourism* memberikan kontribusi terhadap 20% pertumbuhan ekonomi global, memperkerjakan 230 juta tenaga kerja, dan diperkirakan, satu pekerjaan *ecotourism* dapat berimplikasi terhadap terciptanya 1,5 pekerjaan lain yang terkait dengan *ecotourism*. (UNEP and WTO, 2005). *Greening ecotourism* berarti dalam pengelolaan *ecotourism* perlu dilakukan dengan ramah lingkungan, memprioritaskan kepentingan masyarakat lokal baik dalam pekerjaan, kesempatan berusaha, serta sedapat mungkin dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal.

### 3.3. *Green Economy* dalam Bidang Energi

Energi fosil yang saat ini menjadi energi utama bagi mesin industri dan ekonomi dunia telah sampai pada taraf mengkhawatirkan. Selain pasokan yang sudah mulai menipis, energi fosil juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Diyakini, bahwa akar permasalahan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim dunia terkait erat dengan konsumsi energi fosil yang sudah berlangsung sejak awal revolusi industri di Eropa. UNFCCC (2009) menyampaikan bahwa penggunaan energi fosil menyumbang 2/3 dari total emisi GRK secara global. Bahkan, biaya adaptasi akibat perubahan iklim pada tahun 2030 dapat mencapai US\$ 50-130 miliar, di mana hampir 60% nya akan ditanggung oleh negara berkembang. Melihat persoalan ini, *green economy* merekomendasikan agar negara-negara di dunia segera melakukan investasi untuk mengganti energi fosil dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

*Green economy* di bidang energi selain penting untuk menyelamatkan bumi tempat kita berpijak, juga menghadirkan peluang ekonomi yang sangat besar. Investasi di bidang pengembangan energi terbarukan sudah mulai memiliki pasar. Sejak tahun 2002 hingga 2010 lalu, nilai investasi global dalam pengembangan energi terbaru telah mencapai nilai 33% dari nilai investasi global (UNEP/SEFI, 2010). Brazil, China, dan India merupakan negara yang telah mengambil peluang tersebut, dan kini menjadi pemimpin dunia dalam mengembangkan energi terbarukan. Hal ini dapat berjalan dengan baik karena adanya komitmen yang kuat dari pemerintah yang diwujudkan dengan adanya kebijakan yang memihak kepentingan tersebut. Tanpa komitmen dan kebijakan dari pemerintah, energi terbarukan hanya akan menjadi wacana.

### 3.4. *Green Economy*, Efisiensi Energi, dan Material

Industri manufaktur dianggap sektor yang boros energi dan sumberdaya. Hal ini tergambarkan dari penggunaan energi listrik yang mencapai 35% dari total penggunaan energi dunia; mengekstrak lebih dari seperempat sumberdaya alam; dan menyumbangkan emisi CO<sub>2</sub> minimum sebesar 20% dari total emisi CO<sub>2</sub> global (IAE, 2008). Selain itu, industri manufaktur juga menghabiskan 10% air dari total kebutuhan global, bahkan pada tahun 2030 akan mencapai 20% dari total kebutuhan air dunia. Hal ini tentu akan menimbulkan persaingan penggunaan air

dengan pengguna lainnya seperti sektor pertanian dan perkotaan (*urban*). Selain itu, industri manufaktur juga menyumbangkan 17% polusi udara; dan kerusakan yang ditimbulkan oleh polusi udara tersebut setara dengan 1-5% dari total nilai GDB global (*World Bank for Reconstruction and Development*, 2010).

*Green economy* pun menuntut industri manufaktur untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan, hemat energi, dan bahan baku. Proses produksi harus didesain ulang agar memungkinkan dilakukan *reusing* dan *recycling* material dan *byproduct*. Karena itu *closed cycle manufacture* merupakan pilihan untuk menghemat bahan baku, energi, air dan lain-lain, sekaligus juga untuk mengurangi buangan limbah. Jika kegiatan manufaktur dilakukan sebagaimana biasanya (*business as usual*); dan taraf hidup terus meningkat maka diprediksi pada tahun 2050 secara global akan dihasilkan limbah sebanyak 13,1 miliar ton; atau 20% lebih tinggi dari yang dihasilkan pada tahun 2009 (UNEP, 2011). Tidak hanya di sektor industri manufaktur, *green economy* pun mendorong pengurangan limbah dan peningkatan efisiensi energi di sektor pertanian, yang jika ini dilakukan maka akan berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan (*food security*). UNEP (2009) melaporkan empat pintu kehilangan bahan pangan, yaitu pada saat pemanenan (*edible crop harvest*), setelah pemanenan (*after harvest*), *meat and dairy*, dan kegiatan konsumsi yang masing-masing senilai 4600 kkal, 4000 kkal, 2800 kkal, dan 2000 kkal per kapita per hari. UNEP menegaskan adalah sangat realistis jika kita menargetkan untuk mengurangi 50% dari pemborosan tersebut pada setiap rantai; dan ini akan berkontribusi yang sangat signifikan dalam penyediaan bahan pangan.

### 3.5. *Green Economy* dan Masyarakat Urban

Kamal-Chaoui dan Robert (2009) dalam papernya yang berjudul *Competitive Cities and Climate Change* mengatakan bahwa saat ini 50% penduduk dunia tinggal di perkotaan, mengkonsumsi 60-80% energi dan menghasilkan 75% emisi karbon. Penduduk perkotaan yang demikian padat dan arus urbanisasi yang cepat memberikan tekanan yang luar biasa terhadap sumber air bersih, sistem buangan dan fasilitas kesehatan; yang sering menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan infrastruktur serta peningkatan biaya kesehatan. Untuk mengatasi hal ini, *Green*

*Economy* mendukung konsep *ecocities* atau *green cities* dengan karakteristik utamanya adalah kepadatan penduduk, perumahan, pekerjaan, hiburan, transportasi dan lain-lain diupayakan pada level kenyamanan.

*Green economy* begitu menaruh perhatian terhadap perkotaan karena dalam beberapa dekade ke depan kota akan mengalami pertumbuhan dan perluasan sejalan dengan pertumbuhan investasi di sejumlah negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi (*emerging economies*). Sebagai contoh, pertumbuhan populasi perkotaan di India meningkat dari 290 juta pada tahun 2001 menjadi 340 juta pada tahun 2008, dan diproyeksikan akan mencapai 590 juta pada tahun 2030. Sebagai konsekuensinya, India harus membangun 700-900 juta meter persegi kawasan pemukiman dan komersial agar dapat mengakomodir pertumbuhan tersebut. Selain itu, India pun harus investasi senilai US\$ 1,2 miliar per tahun untuk membangun 350-400 km *subway* dan 25.000 km jalan raya.

Keadaan yang serupa juga dialami oleh China, di mana jumlah penduduk perkotaan diproyeksikan akan naik dari 650 juta pada tahun 2010 menjadi 905 juta pada tahun 2030 (*World Urban Prospect*, 2010). Untuk menyiapkan infrastruktur bagi penduduk perkotaan tersebut, China harus mengalokasikan anggaran sebesar 10% dari total GDP pada tahun 2001 atau sekitar 800-900 miliar RMB setiap tahunnya.

Selanjutnya, yang menjadi perhatian *Green economy* adalah dampak dari pembangunan tersebut. Sebagaimana telah diketahui, gedung-gedung pemukiman, perkantoran dan lain-lain merupakan kontributor utama emisi CO<sub>2</sub>. Secara global, sepertiga dari penggunaan energi akhir berlangsung dalam gedung-gedung, yang setara dengan 8,6 miliar ton CO<sub>2</sub> per tahun. Pada proses konstruksi pun tak luput dari perhatian *green economy*. Karena proses konstruksi setiap tahunnya menggunakan sepertiga dari sumberdaya global, termasuk 12% sumberdaya air, serta menghasilkan 40% limbah padat (IPCC, 2007). Oleh karena itu, pada proses pengembangan kota, *Green economy* merekomendasikan agar karakteristik *green cities* diperhatikan.

#### 4. Catatan Kritis Terhadap *Green Economy*

Dokumen UNEP tentang *green economy* tidak menyampaikan gagasan baru. Ide yang disampaikan kurang lebih sama dengan pembangunan berkelanjutan yang telah dikenal dan menjadi agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) sejak Rio Summit 20 tahun lalu. Menjelang *Rio Summit+20* pada bulan Juni 2012, ada upaya pengarus-utamaan (*mainstreaming*) *Green Economy* dan berupaya menjadikannya pokok bahasan utama menggantikan konsep pembangunan berkelanjutan. Karena tidak ada perbedaan mendasar antara *green economy* dengan pembangunan berkelanjutan, lantas banyak yang mempertanyakan upaya pengarus-utamaan tersebut bahkan mencurigai adanya agenda terselubung dari negara-negara maju.

Khor (2011) mempertanyakan ide baru baru dari *green economy*. Kalau yang dimaksud *green economy* adalah konservasi SDAL, pengurangan emisi karbon, menurunkan polusi, penghematan energi, air dan lain-lain, bukankah hal tersebut telah menjadi perhatian dan keinginan kita? Lagi pula UNEP tidak menjelaskan strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Selain itu, bagi negara miskin permasalahannya adalah sama yaitu bagaimana memicu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan secara nyata dan menciptakan lapangan pekerjaan. *Green economy* tidak menjelaskan hal tersebut, sebagaimana ia tidak menjelaskan bagaimana membangun ekonomi yang ramah lingkungan. Karena keridakjelasan konsep *green economy*, banyak negara berkembang menempatkan konsep *green economy* hanya penegasan ulang atas konsep pembangunan berkelanjutan dan memperkuat komitmen untuk merealisasikan dunia yang semakin hijau.

Di samping itu, Khor (2011) menyampaikan beberapa hal yang patut diwaspadai berkaitan dengan upaya pengarus-utamaan *green economy* pada Rio Summit mendatang. Pertama, *green economy* dikhawatirkan hanya menekankan pada dimensi lingkungan. Padahal, negara berkembang masih perlu mempertimbangkan dimensi pertumbuhan ekonomi dan keadilan. Jika hanya menekankan pada dimensi lingkungan dan negara berkembang dipaksa secara sepihak untuk menjalankannya, bisa dipastikan upaya pencapaian kesejahteraan rakyat di negara berkembang akan semakin sulit. Alokasi anggaran akan terserap habis untuk memenuhi tuntutan



*green economy*. Kedua, dikhawatirkan pula bahwa konsep *green economy* diperlakukan sebagai resep tunggal yang dianggap manjur untuk semua negara. Padahal setiap negara memiliki jenis dan tingkat permasalahan yang berbeda. Ketiga, dalam perkembangannya *green economy* dapat menjadi alat proteksi perdagangan (*non tariff barrier*). Hal ini terutama diberlakukan secara sepihak oleh negara maju untuk menolak impor barang dari negara berkembang yang dianggap belum menjalankan *green economy*. Jika demikian kejadiannya, maka negara berkembang akan berusaha memaksakan diri untuk memenuhi kualifikasi *green economy* dan mengabaikan investasi untuk sektor lain yang lebih penting. Keempat, *green economy* pun disinyalir dapat menjadi prasyarat bagi negara berkembang untuk mendapatkan bantuan, pinjaman, penjadwalan ulang atau pembebasan hutang. Jika demikian, negara berkembang akan berkuat mengatasi persoalan lingkungan dan lupa mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Selain itu, isu lain terkait dengan *green economy* adalah peran sektor publik dan swasta serta peran regulasi dan mekanisme pasar dalam permasalahan lingkungan. Banyak yang meyakini bahwa sesungguhnya timbulnya permasalahan lingkungan merupakan indikasi kegagalan ekonomi pasar (*market failure*) dan peran sektor swasta. Sektor swasta dan mekanisme pasar telah mendorong terjadinya eksploitasi sumberdaya alam yang berujung pada terjadinya deplesi sumberdaya alam, polusi, pemanasan global dan degradasi lingkungan pada umumnya. Oleh karena itu, *green economy* seharusnya mengatur dan mengendalikan sektor swasta agar membatasi secara ketat pembuangan emisi, polusi, penggunaan pestisida, selain penerapan pajak dan denda. *Green economy* seharusnya mengupayakan negara-negara maju yang sudah jelas-jelas merupakan kontributor utama emisi gas rumah kaca, polusi dan bahan buangan lainnya mengurangi emisinya. *Market based solution* seperti memperjualbelikan izin membuang emisi (*emission permit trade*) harus ditolak karena hal itu dapat dijadikan alat bagi negara maju untuk mengabaikan kewajibannya mengurangi limbah. Mekanisme REDD telah memberikan pengalaman berharga. Negara maju yang telah nyata-nyata memberikan *share* terbesar bagi pemanasan global bebas membuang gas rumah kaca. Di pihak lain, negara berkembang diminta melestarikan hutan untuk menyerap GRK yang mereka buang dengan imbalan yang tidak seberapa.

Hal lain yang harus dilihat secara kritis adalah rekomendasi *green economy* untuk mencabut subsidi sebagai syarat utama memasuki era *green economy*. Kebijakan subsidi bidang energi terutama terkait dengan penggunaan bahan bakar fosil dituntut segera dicabut. Karena hal ini dianggap menghambat upaya penemuan atau pencarian energi terbarukan yang ramah lingkungan. Logika ini sepertinya benar, namun bertentangan dengan fakta di lapangan di mana masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil serta masyarakat golongan tidak mampu membutuhkan subsidi pemerintah. Jika subsidi energi dicabut, mereka akan semakin mengalami kesulitan hidup. Padahal, pelaku usaha kecil dan mikro serta golongan tidak mampu merupakan kelompok mayoritas.

Demikian pula di sektor perikanan, pencabutan subsidi bahan bakar akan membuat nelayan kecil semakin menderita. Apalagi saat ini mereka sedang menghadapi fenomena perubahan iklim mikro. Tidak ada pilihan, mereka harus beradaptasi dengan situasi yang berubah ini. Hal itu telah memaksa mereka meningkatkan biaya operasional sekedar untuk mempertahankan hasil tangkapan bukan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Lagi pula, tuduhan UNEP sebagaimana disampaikan dalam dokumen *green economy* bahwa subsidi di sektor perikanan merupakan *driving factor* terjadi *over fishing* masih dipertanyakan keabsahan ilmiahnya. Terjadinya *over fishing* bukan karena subsidi bahan bakar bagi nelayan tapi karena keserakahan nelayan bermodal besar dan lemahnya kelembagaan.

Hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah pengembangan standar *clean technology* sebagai bagian dari agenda *green economy*. Kita membutuhkan teknologi ramah lingkungan seperti mesin yang menghasilkan rendah karbon, hemat energi, dan sedikit limbah. Teknologi semacam itu sudah dikembangkan di sejumlah negara Eropa, Amerika, Jepang, Cina dan India; dan hasilnya sudah dipatenkan dengan perlindungan hak kepemilikan intelektual (*intellectual property right*). Jika prasyarat *clean technology* diberlakukan pada negara berkembang yang masih miskin sebagai bagian dari pelaksanaan *green economy*, tentu akan sangat memberatkan negara berkembang tersebut. Mereka harus mengeluarkan tambahan belanja untuk memenuhi tuntutan tersebut dan mengurangi anggaran pos lain yang lebih penting untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain.

Pandangan kritis atas beberapa aspek dari *green economy* tidak dimaksudkan sebagai pandangan yang menentang semangat membangun bumi agar semakin hijau. Membangun bumi semakin hijau agar nyaman untuk dihuni merupakan harga mati dan sudah sepantasnya menjadi komitmen kita bersama. Namun, untuk mencapai hal itu tidak harus menggunakan resep yang sama yang bernama *green economy*, apalagi jika dalam pelaksanaannya dipaksakan secara sepihak, mengisyratakan adanya *unfair* menguntungkan dari negara-negara maju dan menambah beban negara-negara berkembang.

## 5. Kesimpulan

Secara prinsip *green economy* tidak memiliki perbedaan mendasar dengan pembangunan berkelanjutan atau pembangunan ramah lingkungan (*environmentally friendly*). Namun perlu diakui, *green economy* memiliki target capaian yang jelas dan terukur, sedangkan pembangunan berkelanjutan bersifat normatif. Oleh karena itu, *green economy* seyogianya dipandang sebagai jalan menuju *sustainable development*.

Hingga kini, konsep *green economy* belum final. Masih terdapat ruang untuk diskusi dan mendebatkannya. Pertemuan-pertemuan tingkat internasional pun terus dilakukan untuk mematangkan konsep tersebut agar ketika dibahas di Rio Summit+20 Juni 2012 mendatang sudah matang dan mengakomodir semua kepentingan, terutama kepentingan negara berkembang yang masih berkuat dengan persoalan-persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan dan lain-lain. Untuk itu, keterlibatan negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam pembahasan naskah tersebut penting dan perlu agar dapat mengawal dan memberikan argumen jika ada indikasi upaya penyimpangan yang secara *unfair* menguntungkan negara maju dan mengabaikan kepentingan negara berkembang.

## Rujukan

- FAO. 2006. Better Forest, Less Poverty. <http://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a064e.pdf>.
- IAE. 2008. Energy Technology Perspective. Cited from UNEP. 2011.
- IPCC. 2007. Climate Change 2007. Mitigation of Climate Change. Contribution of Working group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
- Irz, X, L. Lin, C. Tirthle and S. Wiggins, 2001: Agriculture Growth and Poverty Alleviation. Development Policy Review 19 (4)
- Kamal-Chaoui dan Robert. 2009. A Competitive Cities and Climate Change. OECD Regional Development Working Paper 2009.
- Khor, M. 2011. Global Debate on Green Economy. <http://www.twinside.org.sg/title2/sdc2012/sdc2012.110101.htm>
- Mulvani, P. 2010. How to Revive Agroecology for Rural Crisis. Discussion paper presented at a discussin at the Department of ESL FEM IPB, 12 March 2010
- Nagayets, O. 2005: Small Farm: Current Status and Key Trends. Prepared for the Future of Small Farm Research Workshop, Wye College. <http://www.ifpri.org/site/default/files/publication>
- OECD/IEA. 2010: Energy Poverty: How to make Modern Energy Access Universal. Published by OECD/IEA
- Pierce, D., A. Markandya dan E.D. Barbier (1989). *Blueprint for A Green Economy*. Earthscan Publications Ltd London.
- Pierce, D., A. Markandya dan E.D. Barbier (1991). *Blueprint 2: Greening the Economy World*. Earthscan Publications Ltd London.
- TEB. 2008. The Economics of Ecosystems and Biodiversity, European Commission, Brussel.
- UNEP. 2004. Childhood Pesticide Poisonin. Information for Advocacy and Action. <http://www.chem.unep.ch/publication>.

- UNEP. 2008. Green Job: Towards Decent work in sustainable, Low Carbon World.
- UNEP. 2010. Green Economy Developing Countries Success Stories. United Nation Environmental Program.
- UNEP. 2011. Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. A Synthesis for Policy Maker. [www.unep.org/greemeconomy](http://www.unep.org/greemeconomy)
- UNEP and WTO. 2005. Making Tourism more Sustainable. A Guide for Policy Maker. UNEP and World Tourism Organization.
- UNEP/SEFI. 2010. Global Trend in Energy Investment 2010. Analysis of Trend and issues in the financing of the renewable energy and energy efficiency.
- UNFCCC. 2009. Recommendation on Future Financing Option for Enhancing the Development, Deployment, Diffusion and Transfer of Technology under the Convention.
- WHO/UNICEF. 2010. Update: Progress on Sanitation and Drinking Water. Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. WHO/UNICEF.
- World Bank. 2008. Economic Impact of Sanitation in Southeast Asia: A Four Country Study conducted in Cambodia, Indonesia, the Philippine and Vietnam
- World Development Report*. 2010. Development and Climate Change. World Bank 2009
- World Bank for Reconstruction and Development. 2010. World Development Indicator.
- World Urban Prospect: The 2009. 2010. Revision: UN Population Division, UN Department of Economics and Social Affairs.

# SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KONSTITUSI/UUD'45 SEBAGAI PIONIR DALAM ASEAN CHARTER

Oleh:  
Didin S Damanhuri<sup>1</sup>

## 1. Pengantar

ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) yang telah berumur sekitar 42 tahun (berdiri tanggal 8 Agustus 1967) telah mengalami banyak kemajuan baik secara politik-keamanan, ekonomi maupun sosial-budaya. Bukti kemajuan tiga aspek itu antara lain dengan terakumulasi dalam bentuk lahirnya ASEAN CHARTER yang ditandatangani oleh 10 negara ASEAN tanggal 20 November 2007 yang dapat menjadi landasan hukum bagi kerjasama ASEAN. Salah satu tujuan lahirnya ASEAN CHARTER adalah: *"committed to intensifying community building through enhanced regional cooperation and integration, in particular by establishing an ASEAN Community comprising The ASEAN Security Community, The ASEAN Economic Community, and The ASEAN Socio-cultural Community"*.

Tujuan khusus ASEAN Charter dalam aspek sosial-ekonomi, antara lain menyangkut poin-poin nomor:

5. *To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labor; and free flow of capital.*

<sup>1</sup> antara lain Staf Ahli Pengajar bid. Ekonomi Lemhannas RI, Pendiri INDEF (*istitute for Development Economics and Finance*), Guru Besar Dep. Ilmu Ekonomi, Fak. Ekonomi & Manajemen/FEM IPB.